

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

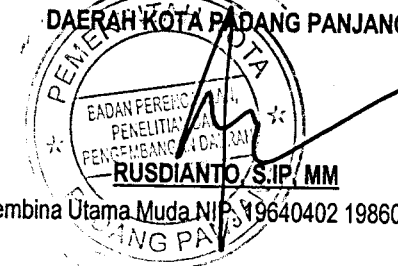
TAHUN : 2022

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program : Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>Tujuan : Terwujudnya perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender</p>	<p>-Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang mengamankan setiap pemerinta daerah membentuk Pokja PUG yang salah satu tugasnya menyusun perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender.</p> <p>-Kondisi saat ini di Kota Padang Panjang Pelaksanaan PPRG belum berjalan maksimal ditandai dengan Pokja PUG baru sebatas SK</p> <p>-Pemahaman Kepala OPD terkait dengan PUG belum Optimal</p> <p>-PUG masih dianggap sebagai tugas tambahan</p> <p>-Fokal Point dimasing OPD belum berjalan optimal ditandai dengan belum semua OPD mempromosikan PUG di masing masing OPD dan PUG belum dianggap sebagai kebutuhan</p> <p>-Belum semua OPD menindaklanjuti terkait Rekomendasi Kebijakan yang dikeluarkan Walikota Padang Panjang untuk mencantumkan</p>	<p>Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya informasi terkait dengan PUG dan PPRG <p>Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Kepala OPD masih kurang ditandai dengan minimnya kehadiran pada pelaksanaan Sosialisasi atau dalam menindaklanjuti dalam penyusunan GAP dan GBS <p>Kontrol Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih dianggap sebagai beban tambahan. - Manfaat penerapan GAP dan GBS tidak langsung terasa - Tidak ada Punishmen dan Reward 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas 	<ul style="list-style-type: none"> - PUG dianggap tidak menarik dan dianggap hanya mengurus masalah perempuan saja 	<p>Terwujudnya Perencanaan yang Responsif Gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelaahan GAP dan GBS OPD - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PUG 	<ul style="list-style-type: none"> - OPD yang sudah membuat GAP dan GBS sudah 24 OPD 	<p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>Input; Rp. 52.353.100,-</p> <p>Output: Penganggaran yang Responsif Gender</p> <p>Outcome; Terwujudnya Pengarusutamaan Gender di Kota Padang Panjang</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	Dasar Hukum, data terpilah dan isue gender di dalam Renstra OPD.							

Padang Panjang, 5 Maret 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG



RUSDianto/S.IP/ MM

Pembina Utama Muda NIP. 19640402 198602 1 003

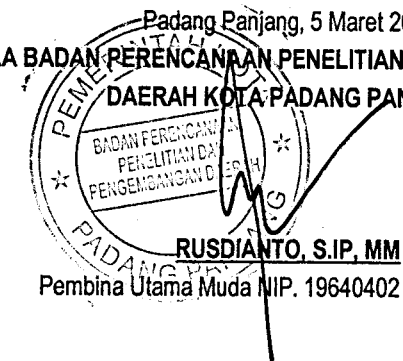
MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN : 2022

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</p> <p>Tujuan : Terlaksananya Musrenbang RKPd tingkat Kota</p>	<p>-Dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yakni UU No 25 tahun 2004 dan Permendagri no 54 tahun 2010, mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan menggunakan pendekatan <i>top down, bottom up</i>, teknokratik, politis, aspiratif.</p> <p>-Musrenbang salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan <i>bottom up</i> dan aspiratif</p> <p>-Kondisi saat ini pada RKPd tahun 2019 dan 2020 porsi terkait dengan isu-isu gender antara lain : disabilitas, lansia, pemuda, anak, kepala rumah tangga miskin, perempuan (janda), dll masih minim baik di BAB II, BAB IV dan BAB V.</p> <p>-Pelaksanaan musrenbang tahun 2019 dan 2020 peserta yang hadir 155 orang.</p> <p>-Komposisi jenis kelamin 74% laki-laki dan 26% perempuan.</p> <p>-Komposisi elemen yang hadir</p>	<p>Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undangan tidak menjangkau semua komponen masyarakat - Jadwal pelaksanaan musrenbang disesuaikan dengan jadwal kepala daerah - Informasi pelaksanaan musrenbang minim - <i>E-planning</i> diharapkan akan mengakomodir semua komponen masyarakat <p>Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materi yang disajikan dan cara penyampaian materi belum komunikatif untuk seluruh komponen yang di undang. <p>Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musrenbang hanya sebatas memenuhi amanat dalam penyusunan dokumen perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola kegiatan belum responsif gender - Minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait penyusunan perencanaan - Karena keterbatasan anggaran mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan substansi yang dibahas - Mindset perencana di bappeda bahwa mengusulkan kegiatan yang baru diluar renstra tidak diperbolehkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi - Pelaksanaan kegiatan musrenbang lebih mengutamakan seremonial daripada substansi pembahasan - Tingkat kehadiran pemangku kebijakan/kepala SKPD minim - Makin tingginya tingkat pengawasan pada penyusunan perencanaan - Masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas pembangunan dan 	<p>Terwujudnya perencanaan yang responsif gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Musrenbang RKPd - Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Padang Panjang - Implementasi sistem perencanaan - Penyusunan RKPd Tahun 2023 - Mengkoordinir pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan musrenbang tahun 2019 dan 2020 peserta yang hadir 155 orang. - Komposisi jenis kelamin 74% laki-laki dan 26% perempuan. - Komposisi elemen yang hadir pemerintah 40%, swasta 2%, masyarakat 58% (ormas, LSM) - Komposisi peserta dari kelompok umur anak-anak (0-18 tahun) 3% pemuda (18 – 30 th) 15% dewasa (30 – 60 th) 75% lansia (60 th ke atas) 7% - Tingkat kehadiran disabilitas pada pelaksanaan musrenbang tahun 	<p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</p> <p>Input : Rp. 122.690.000,-</p> <p>Output : Jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan</p> <p>Outcome : Terlaksananya kordinasi perencanaan pembangunan antara <i>stakeholder</i> yang ada</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	<p>pemerintah 40%, swasta 2%, masyarakat 58% (ormas, LSM)</p> <p>-Komposisi peserta dari kelompok umur anak-anak (0-18 tahun) 3% pemuda (18 – 30 th) 15% dewasa (30 – 60 th) 75% lansia (60 th ke atas) 7%</p> <p>-Tingkat kehadiran disabilitas pada pelaksanaan musrenbang tahun 2019 dan 2020</p>	<p>Manfaat</p> <p>- Porsi pengalokasian anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan <i>top down</i> dan politik.</p>		<p>kewenangan masing-masing pemerintah daerah</p> <p>- Musrenbang belum dianggap sebagai sesuatu hal yang penting untuk didukung oleh penganggaran yang maksimal</p> <p>- Domain politik dalam penyusunan penganggaran lebih dominan</p>			2019 dan 2020	

Padang Panjang, 5 Maret 2021
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH KOTA PADANG PANJANG



RUSDianto, S.IP, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19640402 198602 1 003